



Diplomasi Perdagangan Riau di Malaysia (2020 -2024) : Upaya Peningkatan Perdagangan Ekspor di Pasar Malaysia

Roza Andriani¹, Amri Hakim², Hariy Laksamana³

^{1,2} Universitas Abdurabb, Indonesia

³ Dinas pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pelalawan, Indonesia

Received : 21 Agustus 2025, Revised : 23 Agustus 2025, Published : 28 Agustus 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Roza Andriani

E-mail: Roza.Andriani@univrab.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan upaya diplomasi perdagangan Indonesia di Provinsi Riau untuk meningkatkan perdagangannya di Malaysia Tahun 2020 – 2024. Konsep yang digunakan Adalah konsep diplomasi perdagangan dari Okano Heijmans, Metode yang digunakan untuk riset ini Adalah metode kualitatif. Sumber data berasal dari studi Pustaka. Hasil riset menunjukkan bahwa dalam periode 2020 -2024, Riau telah melakukan diplomasi perdagangan di Malaysia Upaya yang dilakukan melalui beberapa strategi utama, antara lain partisipasi aktif dalam misi dagang dan pameran internasional, peninjauan kerja sama dagang langsung dengan negara bagian Malaysia seperti Johor dan Selangor, serta pelibatan dinas perdagangan provinsi Riau dan perwakilan perdagangan Indonesia (Atdag dan ITPC) di Kuala Lumpur dan Penang. Pemerintah Riau juga aktif mendorong ekspor komoditas unggulan seperti kelapa, nanas, sagu, serta produk olahan UMKM berbasis kearifan lokal Melayu ke pasar Malaysia. Namun, sejumlah kendala masih menghambat peningkatan ekspor, seperti persyaratan sertifikasi halal dan standar mutu Malaysia yang ketat, keterbatasan logistik, serta rendahnya kesadaran branding produk lokal di pasar internasional. Meski demikian, Malaysia tetap menjadi pasar strategis dengan potensi besar bagi produk-produk Riau mengingat kedekatan geografis, kedekatan budaya Melayu, dan hubungan ekonomi bilateral yang telah terbina baik. Peluang kerja sama melalui joint venture, peningkatan promosi dagang, serta pendirian pusat distribusi produk Riau di wilayah perbatasan atau pelabuhan utama Malaysia menjadi opsi strategis yang dapat dimaksimalkan.

Kata kunci - diplomasi ekonomi, tarif ekspor, hambatan perdagangan, diplomasi perdagangan

Abstract

This research aims to explain Indonesia's trade diplomacy efforts in Riau Province to enhance its trade relations with Malaysia from 2020 to 2024. The concept used is trade diplomacy as defined by Okano-Heijmans, and the research employs a qualitative method. Data sources are derived from literature studies. The findings indicate that between 2020 and 2025, Riau has actively engaged in trade diplomacy with Malaysia through several key strategies. These include active participation in trade missions and international exhibitions, initiating direct trade cooperation with Malaysian states such as Johor and Selangor, and involving Riau's provincial trade office along with Indonesian trade representatives (Atdag and ITPC) in Kuala Lumpur and Penang. The Riau government has also actively promoted the export of key commodities such as coconut, pineapple, sago, and locally rooted SME (UMKM) processed products based on Malay cultural heritage to the Malaysian market. However, several obstacles still hinder export growth, including stringent halal certification and quality standards in Malaysia, logistical limitations, and low international branding awareness for local products. Despite these

challenges, Malaysia remains a strategic market with significant potential for Riau's products due to geographic proximity, shared Malay cultural ties, and well-established bilateral economic relations. Opportunities for cooperation through joint ventures, enhanced trade promotion, and the establishment of Riau product distribution centers in border areas or major Malaysian ports are strategic options that can be further optimized

Keywords - economic diplomacy, export tariffs, trade barriers, trade diplomacy

How to Cite : Andriani, R., Hakim, A., & Laksamana, H. (2025). *Diplomasi Perdagangan Riau di Malaysia (2020 -2024) : Upaya Peningkatan Perdagangan Ekspor di Pasar Malaysia* . *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 2(3), 705–717.
<https://doi.org/10.59837/jpnmb.v2i3.581>

Copyright ©2025 Roza Andriani, Amri Hakim, Hariy Laksamana

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional memegang peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Dalam rentang 2020 hingga 2024, Indonesia menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020, melambat 2,07% dibanding tahun sebelumnya, perlambatan ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 juga diiringi dengan memburuknya kinerja perdagangan luar negeri (Natsha Nabilla, 2021). Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan yang cukup signifikan pada periode 2020, terutama karena ketergantungan tinggi pada mitra ekspor tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa yang saat itu tengah menghadapi krisis ekonomi global. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menekankan pentingnya membangun kemandirian ekonomi, salah satunya melalui penguatan ekspor nasional. Dalam bidang politik luar negeri, pemerintah memperkuat diplomasi perdagangan, termasuk memperluas pasar ekspor ke negara-negara mitra non-tradisional dan mempererat hubungan dagang kawasan seperti ASEAN. termasuk melalui kerja sama perdagangan lintas daerah dan promosi ekspor produk lokal dari provinsi-provinsi strategis, seperti di Provinsi Riau (Angriawan & Mutiarin, 2019).

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah penghasil komoditas strategis seperti sagu, nanas, serta produk pertanian dan olahan UMKM berbasis budaya lokal Melayu. Posisi geografis Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia, serta kedekatan budaya dan sejarah yang kuat, menjadikan Malaysia sebagai pasar yang sangat potensial untuk perluasan ekspor produk Riau. Menurut data terbaru BPS, nilai ekspor Provinsi Riau pada tahun 2023 mencapai US\$ 18,87 miliar, meskipun mengalami penurunan sebesar 16,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Malaysia tercatat sebagai mitra dagang utama ketiga bagi Riau setelah Tiongkok dan India, dengan nilai ekspor sebesar US\$ 1,13 miliar atau sekitar 6,6% dari total ekspor nonmigas Riau (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2020, n.d.). Hal ini menegaskan bahwa Malaysia adalah mitra dagang regional yang penting, terutama untuk komoditas pertanian, pangan, dan olahan yang dihasilkan oleh Riau, namun kontribusi perdagangan Riau ke Malaysia masih belum maksimal. Tantangan seperti sertifikasi halal yang ketat di Malaysia, hambatan logistik, standar mutu ekspor yang belum seragam, serta rendahnya promosi produk lokal di pasar internasional menjadi kendala utama. Hal ini mendorong perlunya upaya sistematis melalui diplomasi perdagangan daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Riau merupakan salah satu daerah penyumbang terbesar ekspor nasional Indonesia. Komoditas utama ekspor Riau antara lain minyak kelapa sawit, karet, bubur kertas (pulp), dan minyak bumi. Namun, pada periode 2019 hingga awal 2020, ekspor Riau sempat mengalami penurunan akibat gejolak harga komoditas global, pandemi Covid-19 serta ketergantungan pada pasar ekspor tradisional seperti Tiongkok dan India (BPS Riau, 2021). Kondisi ini menuntut adanya strategi yang lebih adaptif dan inovatif dalam memperluas pasar ekspor, salah satunya dengan memperkuat kerja sama perdagangan dengan negara tetangga seperti Malaysia.

Malaysia merupakan salah satu mitra dagang strategis Indonesia di kawasan ASEAN. Hubungan perdagangan antara Riau dan Malaysia memiliki posisi yang sangat penting karena kedekatan geografis, kedekatan budaya Melayu, serta adanya keterhubungan sejarah dan mobilitas ekonomi lintas batas yang kuat, terutama melalui Pelabuhan Dumai dan Malaka. Malaysia termasuk dalam lima besar negara tujuan ekspor utama Riau, dengan komoditas unggulan seperti *Crude Palm Oil (CPO)*, produk olahan kelapa sawit, dan pulp (Disperindag Riau, 2022). Namun demikian, potensi kerja sama perdagangan antara Riau dan Malaysia masih belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama dalam konteks perdagangan antarwilayah yang berbasis provinsi dan subnasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau melalui dinas terkait mulai mendorong pendekatan *subnational economic diplomacy* atau diplomasi ekonomi antarwilayah dengan fokus pada Malaysia sebagai pasar utama. Diplomasi perdagangan ini menjadi strategi penting dalam meningkatkan akses pasar, memperluas ragam produk ekspor, serta menjalin kerja sama dagang langsung antara pelaku usaha Riau dengan mitra bisnis di Malaysia, baik melalui forum dagang, pameran internasional, misi dagang, maupun kerja sama bilateral tingkat provinsi. (Sherlya Paiti, 2009)

Kegiatan diplomasi perdagangan ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mendorong penguatan peran daerah dalam pencapaian target ekspor non-migas Indonesia, terutama di pasar ASEAN. Dalam hal ini, Malaysia dianggap sebagai *target market* yang sangat potensial karena pertumbuhan ekonomi yang stabil, permintaan tinggi terhadap produk agrikultur dan bahan baku industri, serta adanya integrasi ekonomi kawasan melalui *ASEAN Economic Community (AEC)*, selain faktor ekonomi, pendekatan diplomasi perdagangan juga memperhatikan aspek sosial budaya dan hubungan masyarakat lintas batas. Riau dan beberapa negara bagian di Malaysia seperti Johor, Selangor, dan Melaka memiliki kesamaan etnis, bahasa, serta sejarah budaya Melayu yang menjadi modal sosial penting dalam menjalin konektivitas perdagangan yang berkelanjutan. Hubungan antarwilayah ini juga diperkuat oleh keberadaan komunitas diaspora, lembaga keagamaan, dan jaringan pengusaha Melayu yang aktif di kedua wilayah.

Diplomasi perdagangan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Riau ke Malaysia pada periode 2020–2024 menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana strategi diplomasi perdagangan dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan volume dan diversifikasi ekspor Riau di pasar Malaysia.

TINJAUAN PUSTAKA

Diplomasi Perdagangan

Diplomasi perdagangan merupakan bagian dari perluasan konsep diplomasi ekonomi yang berfokus pada upaya negara (atau aktor subnasional seperti provinsi) dalam meningkatkan perdagangan dan investasi dengan negara lain. Dalam konteks desentralisasi dan globalisasi ekonomi, diplomasi perdagangan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah sebagai bentuk keterlibatan subnasional dalam hubungan internasional ekonomi (*paradiplomacy*).

Menurut Okano-Heijmans (2013), diplomasi ekonomi adalah penggunaan sarana politik untuk mencapai tujuan ekonomi negara, sekaligus penggunaan sarana ekonomi untuk mencapai stabilitas politik. Dalam konteks ini, diplomasi perdagangan menjadi salah satu instrumen utama dalam *business end* dari diplomasi ekonomi, yang berorientasi pada peningkatan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi lintas batas. Pemerintah daerah dapat berperan aktif melalui kegiatan misi dagang, pameran perdagangan internasional, fasilitasi perizinan ekspor, promosi komoditas unggulan, serta membangun jejaring kerja sama antarwilayah dengan negara mitra dagang.

Okano-Heijmans mengidentifikasi tiga ketegangan yang menjadi dasar urgensi diplomasi ekonomi:

1. Ketegangan antara aspek politik dan ekonomi,

2. Ketegangan antara tekanan internasional dan kepentingan domestik,
3. Ketegangan antara aktor negara dan non-negara seperti pelaku usaha, LSM, dan masyarakat sipil.

Dalam hal ini, aktor dalam diplomasi perdagangan tidak hanya terbatas pada pemerintah, tetapi juga mencakup pelaku usaha lokal, asosiasi dagang, dan pelaku UMKM sebagai bagian dari jaringan diplomasi ekonomi.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berpijak pada pandangan bahwa diplomasi perdagangan subnasional dapat memperkuat hubungan dagang bilateral secara lebih langsung dan fleksibel. Provinsi Riau sebagai aktor subnasional memiliki kepentingan untuk memperluas pasar ekspor ke Malaysia, yang secara geografis dan kultural sangat dekat. Malaysia bukan hanya menjadi mitra dagang tradisional Indonesia, tetapi juga merupakan pasar penting bagi produk ekspor Riau seperti CPO, pulp, dan karet.

Diplomasi perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dapat dikategorikan sebagai bagian dari *business end* diplomacy, yang lebih fokus pada peningkatan nilai komersial dan pencapaian kemakmuran ekonomi. Aktivitas diplomasi perdagangan ini antara lain:

- Misi dagang dan promosi produk unggulan Riau di Malaysia,
- Pertemuan bisnis (business matching) antara pelaku usaha Riau dan Malaysia,
- Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dagang antarpemerintah daerah,
- Fasilitasi ekspor oleh dinas terkait seperti Disperindag dan Dinas Penanaman Modal,
- Keterlibatan Konsulat Jenderal Indonesia (KJRI) di Johor dan Penang dalam memperluas akses pasar.

Setiap aktivitas diplomasi ini membentuk suatu jaringan kebijakan yang saling terkait dan dapat saling memengaruhi. Seperti yang dijelaskan oleh Heijmans, kegiatan seperti promosi ekspor akan lebih efektif jika disertai dengan kebijakan pengurangan hambatan tarif atau regulasi teknis melalui kerja sama bilateral. Sebaliknya, apabila terdapat hambatan perdagangan seperti proteksionisme atau ketegangan politik, maka aktivitas perdagangan dan investasi akan terhambat pula.

Oleh karena itu, keberhasilan diplomasi perdagangan Riau di Malaysia sangat ditentukan oleh kemampuan aktor-aktor lokal dalam mengelola strategi perdagangan luar negeri secara adaptif, membangun kerja sama lintas sektor, dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas aktivitas diplomasi yang telah dilakukan. Optimalisasi diplomasi perdagangan juga memerlukan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat (Kemlu, Kemendag) dan pemerintah daerah, serta dukungan dari pelaku usaha dan jaringan diaspora Indonesia di Malaysia, melalui pendekatan ini, diplomasi perdagangan tidak hanya dilihat sebagai tugas negara secara umum, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan daerah yang berorientasi pada ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing produk lokal di pasar internasional.

Diplomasi perdagangan merupakan salah satu bentuk diplomasi ekonomi yang berfokus pada kerja sama perdagangan, strategi negosiasi, penyusunan perjanjian perdagangan, serta pengelolaan hambatan tarif dan non-tarif yang memengaruhi alur perdagangan antarnegara. Merujuk pada Heijmans (2013), diplomasi perdagangan menempati posisi strategis dalam *business end* diplomacy dengan tujuan utama menciptakan kemakmuran ekonomi dan stabilitas politik melalui peningkatan arus ekspor dan impor. Dalam konteks ini, diplomasi perdagangan tidak hanya menjadi domain pemerintah pusat, tetapi juga dapat dilaksanakan oleh aktor subnasional seperti pemerintah provinsi dalam kerangka *subnational diplomacy*.

Melalui pendekatan ini, Pemerintah Provinsi Riau dapat memanfaatkan diplomasi perdagangan untuk meningkatkan ekspor ke Malaysia, khususnya dengan memanfaatkan kedekatan geografis, sosial budaya, serta integrasi pasar ASEAN. Berdasarkan kerangka *tools and expressions* dari

Heijmans, terdapat beberapa aktivitas atau instrumen diplomasi perdagangan yang dapat dijadikan alat analisis dalam studi ini:

1. Perjanjian Bilateral Perdagangan

Pemerintah Provinsi Riau, meskipun tidak memiliki kewenangan penuh untuk menandatangani perjanjian internasional, dapat mendorong perjanjian dagang antarwilayah atau *memorandum of understanding* (MoU) antara Riau dengan negara bagian tertentu di Malaysia, seperti Johor atau Selangor. MoU ini dapat mencakup kerja sama dalam promosi dagang, fasilitasi ekspor, pengembangan pelabuhan, serta pertukaran informasi perdagangan. Perjanjian ini menjadi landasan formal untuk memperkuat konektivitas dagang dan memperluas pasar bagi produk ekspor Riau.

2. Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Kerangka ASEAN dan ASEAN Economic Community (AEC) menjadi platform penting dalam mendukung perdagangan antara Riau dan Malaysia. Sebagai bagian dari Indonesia, Riau dapat mengambil manfaat dari liberalisasi perdagangan intra-ASEAN, termasuk penghapusan tarif untuk produk-produk unggulan Riau. Selain itu, kerja sama lintas provinsi di bawah kerangka Sister Province Program atau Forum BIMP-EAGA (Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area) juga dapat dijadikan sarana mendorong diplomasi perdagangan subnasional.

3. Tarif Anti Dumping

Kebijakan tarif dan praktik anti-dumping dari Malaysia terhadap produk-produk ekspor dari Indonesia, termasuk dari Riau, merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi volume perdagangan. Pemerintah Riau, melalui koordinasi dengan Kementerian Perdagangan RI dan perwakilan dagang Indonesia di Malaysia (KBRI/KJRI), dapat melakukan diplomasi untuk mengurangi hambatan tarif serta mencegah penerapan kebijakan anti-dumping yang merugikan pelaku usaha lokal.

4. Lisensi Ekspor dan Impor

Regulasi perizinan ekspor dan impor merupakan aspek teknis penting dalam diplomasi perdagangan. Pemerintah daerah, melalui Dinas Perdagangan atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), berperan dalam memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan lisensi ekspor, sertifikasi halal, sertifikat kualitas produk, dan standar teknis lainnya yang menjadi syarat utama dalam memasuki pasar Malaysia. Keterlibatan pemerintah daerah dalam pendampingan proses perizinan ekspor menjadi bagian dari praktik diplomasi ekonomi berbasis pelayanan.

5. Kuota Ekspor dan Impor serta Hambatan Perdagangan

Malaysia memiliki regulasi terkait kuota dan standar teknis untuk impor komoditas pertanian, makanan, dan produk industri tertentu. Hambatan ini dapat menjadi tantangan bagi produk Riau, seperti CPO, karet olahan, atau produk perikanan. Melalui kerja sama bilateral dan forum dagang, Pemerintah Riau dapat mengusulkan pembukaan kuota khusus atau pengurangan hambatan nontarif terhadap produk-produk unggulan daerah. Aktivitas ini dapat dijalankan bersama dengan pelaku usaha dan asosiasi eksportir untuk membuka akses pasar yang lebih luas di Malaysia.

Dengan menggunakan *tools and expressions* diplomasi perdagangan sebagaimana dikemukakan oleh Heijmans, penelitian ini akan menganalisis bagaimana Pemerintah Provinsi Riau, dalam periode 2020–2024, menjalankan aktivitas-aktivitas diplomasi untuk meningkatkan ekspor ke pasar Malaysia. Kerangka ini juga akan memetakan faktor-faktor pendukung, hambatan, serta efektivitas strategi diplomasi perdagangan yang dilakukan dalam skala regional (provinsi) dengan tujuan memperkuat peran Riau sebagai salah satu pusat ekspor Indonesia di kawasan ASEAN.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Lamont (2015). Metode kualitatif merupakan strategi atau pendekatan dalam pengumpulan dan analisis data yang bersifat non-numerik (Lamont, 2015: 79). Dalam metode ini, data yang diperoleh tidak diubah menjadi angka, melainkan dianalisis dalam bentuk narasi, baik secara lisan maupun tulisan, yang menggambarkan konteks secara mendalam (Lamont, 2015: 78).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat interpretif, yaitu dengan menganalisis data secara intersubjektif untuk menghasilkan makna dan pemahaman yang bersifat reflektif. Penulis berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan dan menafsirkan data yang relevan dengan topik diplomasi perdagangan Riau di Malaysia. Selain itu, penulis juga dibantu oleh beberapa instrumen tambahan untuk menunjang proses riset, seperti pedoman wawancara, buku catatan, perangkat laptop, telepon genggam, serta akses jaringan internet.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Pemerintah Provinsi Riau melakukan aktivitas diplomasi perdagangan ke Malaysia selama periode 2020–2024, serta untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas diplomasi perdagangan tersebut dalam meningkatkan ekspor daerah. Oleh karena itu, fokus utama dalam riset ini adalah pada makna, strategi, dan praktik kebijakan luar negeri subnasional dalam konteks perdagangan internasional.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan riset kualitatif, penulis melakukan pendekatan secara interpretif. Penulis mengumpulkan data untuk dianalisis secara intersubjektif sehingga menghasilkan interpretasi secara subjektif. Hasil analisis kemudian dijelaskan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah penulis. Penulis berperan dalam melakukan pengumpulan serta pengujian data atau dokumen yang diperlukan. Penulis menelusuri informasi dari portal berita, laporan daring, artikel akademik, serta publikasi pemerintah atau lembaga riset yang berkaitan dengan diplomasi perdagangan dan kerja sama ekonomi antara Indonesia (khususnya Riau) dan Malaysia.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan *discourse analysis* atau analisis wacana. Teknik ini bertujuan untuk menggali makna dari praktik diplomasi perdagangan melalui bahasa, narasi kebijakan, dan konstruksi sosial-politik yang tercermin dalam dokumen, pernyataan resmi. Data yang telah terkumpul dari berbagai sumber kemudian dikategorisasikan berdasarkan tema, seperti jenis aktivitas diplomasi, bentuk kerja sama perdagangan, hambatan dagang, serta implikasinya terhadap ekspor Riau. Penulis melakukan interpretasi secara mendalam terhadap masing-masing data untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, untuk menjaga validitas data, penulis menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sumber (primer dan sekunder) guna memastikan keabsahan informasi. Sementara itu, untuk mengukur reliabilitas, penulis melakukan pengecekan berulang terhadap data, interpretasi, serta konsistensi antara temuan lapangan dan dokumen yang digunakan. Hal ini dilakukan agar hasil riset yang diperoleh dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

PEMBAHASAN

Salah satu misi utama dalam diplomasi perdagangan Provinsi Riau ke Malaysia adalah meningkatkan volume dan nilai ekspor produk unggulan daerah. Malaysia menjadi mitra dagang strategis karena kedekatan geografis, kedekatan budaya, serta integrasi regional melalui ASEAN yang memberikan peluang besar dalam peningkatan akses pasar.

Dalam upaya memperkuat posisi ekspor Riau ke Malaysia, Pemerintah Provinsi Riau melalui koordinasi dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru, serta Atase Perdagangan di Kuala Lumpur, aktif mendorong promosi perdagangan dan

mengupayakan pengurangan hambatan tarif maupun non-tarif terhadap produk-produk ekspor seperti kelapa sawit, olahan karet, dan produk perikanan.

Salah satu forum penting yang dimanfaatkan oleh Indonesia adalah ASEAN–Malaysia bilateral trade forum dan kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) yang dihadiri oleh pelaku usaha dari Riau dan buyer Malaysia. Dalam forum tersebut, Indonesia mendorong Malaysia untuk memberikan kemudahan dalam perizinan impor serta mengurangi hambatan teknis yang dinilai masih menghambat kelancaran distribusi produk ekspor asal Riau.

Sebagai bagian dari strategi diplomasi ekonomi, Riau juga mengoptimalkan peran perwakilan dagangnya di Malaysia untuk membina relasi dengan pelaku bisnis lokal serta menyelenggarakan misi dagang dan business matching antara UMKM Riau dengan importir dan distributor Malaysia. Beberapa misi dagang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau yang bekerja sama dengan Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru dan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur.

Selain itu, peningkatan kerja sama perdagangan Riau–Malaysia juga dilakukan melalui pendekatan diplomatik dalam forum Foreign Office Consultation (FOC) antara Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Luar Negeri Malaysia. Dalam forum ini, isu-isu perdagangan daerah juga turut dibahas, termasuk perlunya fasilitasi ekspor produk daerah ke pasar Malaysia.

Dalam kerangka diplomasi perdagangan Riau ke Malaysia pada periode 2020–2024, berbagai inisiatif telah dan sedang dilakukan, seperti (Kementerian Luar Negeri RI., 2024):

- Misi dagang dan business matching antara pelaku usaha Riau dan buyer Malaysia melalui kerja sama dengan KBRI Kuala Lumpur dan ITPC Penang.
- Peningkatan promosi produk lokal Riau melalui pameran seperti MIHAS (Malaysia International Halal Showcase) dan promosi digital.
- Penjajakan kerja sama bilateral antara provinsi Riau dengan negara bagian Malaysia seperti Johor dan Selangor, termasuk rencana pengembangan pusat distribusi dan gudang logistik di kawasan perbatasan.
- Pelibatan diaspora dan pelaku usaha Melayu Riau di Malaysia sebagai jembatan promosi produk budaya dan kuliner khas Riau.

Upaya-upaya ini merupakan bagian dari strategi diplomasi perdagangan daerah yang bertujuan memperluas akses pasar, memperkuat identitas produk Riau, dan meningkatkan daya saing komoditas ekspor Riau di kawasan Asia Tenggara, khususnya Malaysia (Febrianti & Suryadipura, 2022; Rokhaniyah et al., n.d.).

Dengan potensi geografis, komoditas unggulan, serta dukungan arah kebijakan nasional yang mendorong diplomasi ekonomi, Riau memiliki peluang besar untuk menjadikan Malaysia sebagai pasar utama produk ekspor nonmigasnya. Diplomasi perdagangan Riau ke Malaysia dalam kurun waktu 2020–2025 menjadi kunci dalam memperkuat hubungan dagang regional dan mewujudkan cita-cita kemandirian ekonomi daerah yang terintegrasi dengan strategi ekonomi nasional.

Namun, upaya peningkatan ekspor Riau ke Malaysia juga menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- Kebijakan karantina dan sertifikasi produk Malaysia yang dinilai ketat terhadap produk pertanian dan perikanan.
- Kurangnya informasi pasar bagi pelaku usaha Riau, terutama UMKM, untuk menembus pasar Malaysia.
- Terbatasnya infrastruktur logistik dan konektivitas pelabuhan langsung antara Riau dan pelabuhan utama di Malaysia.

Meski belum ada perjanjian perdagangan bebas secara khusus antara Riau dan Malaysia, namun hubungan dagang tetap berlangsung baik. Kedua pihak menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kerja sama ekonomi melalui perluasan akses pasar, fasilitasi perdagangan, dan promosi

produk unggulan daerah. Hal ini tercermin dari peningkatan ekspor beberapa komoditas Riau ke Malaysia selama periode 2020–2024 meskipun masih fluktuatif akibat pandemi COVID-19 dan kondisi ekonomi global.

Dengan demikian, diplomasi perdagangan yang dilakukan Riau melalui kolaborasi antar-pemerintah dan pelaku usaha telah menjadi instrumen penting dalam memperkuat penetrasi pasar ekspor ke Malaysia. Ke depan, pembentukan kerja sama dagang yang lebih terstruktur, seperti kesepakatan dagang bilateral di sektor-sektor unggulan, diharapkan dapat menjadi instrumen kunci untuk menurunkan hambatan ekspor dan meningkatkan daya saing produk Riau di pasar Malaysia.

Pemanfaatan Forum Multilateral dalam Meningkatkan Perdagangan Riau di Pasar Malaysia

Kerja sama multilateral dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkuat diplomasi perdagangan, termasuk oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan ekspor ke pasar Malaysia. Salah satu forum yang potensial adalah Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) serta kerja sama dalam kerangka ASEAN. Forum-forum ini dapat digunakan sebagai katalis untuk mempererat hubungan perdagangan antara Riau dan Malaysia, khususnya dalam memfasilitasi pelaku usaha daerah dalam menembus pasar ekspor.

Melalui forum seperti IMT-GT, Indonesia, termasuk wilayah Riau, memiliki peluang untuk memperkuat integrasi ekonomi subkawasan, mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang logistik, dan mempromosikan produk unggulan ekspor. Malaysia sebagai salah satu mitra utama dalam IMT-GT membuka ruang kerja sama langsung yang dapat dimanfaatkan oleh Riau, terutama dalam sektor perdagangan barang, jasa, dan pariwisata.

Penyelenggaraan IMT-GT Business Forum dan Trade Expo ASEAN secara berkala juga menjadi peluang penting. Dalam forum tersebut, Riau dapat memperkenalkan produk unggulannya seperti kelapa sawit, olahan perikanan, produk pertanian, dan komoditas industri kepada para pelaku bisnis Malaysia dan ASEAN. Meskipun forum ini bersifat regional, peran aktif pemerintah daerah dalam mendorong pelaku usaha lokal untuk ikut serta merupakan bentuk nyata diplomasi perdagangan daerah, selain itu, forum ASEAN Economic Community (AEC) juga membuka peluang untuk menurunkan hambatan tarif dan non-tarif antarnegara anggota, termasuk Malaysia. Hal ini memberikan keuntungan bagi Riau dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk ekspor ke Malaysia. Misalnya, pembahasan terkait penyederhanaan prosedur kepabeanan dan harmonisasi standar produk sangat relevan bagi eksportir Riau yang menghadapi kendala teknis dalam ekspor ke Malaysia. (Fadillah Wiyototsani et al., n.d.)

Dalam pertemuan ASEAN pada tahun 2023, Indonesia menekankan pentingnya penguatan kerja sama perdagangan lintas batas (cross-border trade) antarwilayah. Provinsi Riau melalui Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Pusat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendorong perjanjian teknis perdagangan dengan negara bagian tertentu di Malaysia seperti Selangor, Johor, dan Penang yang secara geografis dan historis memiliki kedekatan dengan Riau.

Diplomasi perdagangan dalam forum multilateral ini juga dapat diwujudkan melalui kegiatan misi dagang dan business matching yang melibatkan pelaku usaha Riau dan mitra usaha di Malaysia. Kegiatan semacam ini tidak hanya memperluas jaringan dagang tetapi juga menjadi wahana negosiasi informal yang berujung pada peningkatan ekspor Riau secara signifikan.

Sebagai contoh konkret, partisipasi pelaku usaha Riau dalam ajang Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) serta Selangor International Business Summit (SIBS) memberikan ruang promosi langsung di jantung pasar Malaysia. Produk olahan halal dari Riau seperti makanan ringan, herbal, dan kosmetik mendapat tempat tersendiri dalam pasar konsumen Malaysia yang mayoritas Muslim.

Dengan demikian, pemanfaatan forum multilateral seperti IMT-GT, ASEAN, dan pameran dagang internasional menjadi bagian penting dari strategi diplomasi perdagangan yang dilakukan oleh

Riau untuk meningkatkan ekspor ke pasar Malaysia. Langkah ini juga memperlihatkan sinergi antara diplomasi nasional dan diplomasi daerah dalam menciptakan peluang ekonomi baru.

Upaya Perlindungan Produk Ekspor Riau di Pasar Malaysia dari Tuduhan Dumping dan Pengenaan Safeguard

Selain upaya penurunan tarif melalui pembentukan kerja sama perdagangan seperti Preferential Trade Agreement (PTA), Indonesia, termasuk Provinsi Riau sebagai salah satu daerah ekspor utama ke Malaysia, juga melakukan langkah-langkah strategis untuk melindungi produknya dari ancaman tuduhan *dumping*, subsidi, maupun pengenaan *safeguard* oleh negara mitra, dalam hal ini Malaysia.

Tindakan *safeguard* merupakan kebijakan pengamanan perdagangan yang diterapkan suatu negara untuk melindungi industri domestik dari lonjakan impor produk tertentu yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam konteks ini, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan dan strategi pembelaan terhadap tuduhan praktik perdagangan tidak adil (*unfair trade practices*) dari negara mitra, termasuk Malaysia.

Melalui kerja sama antara Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, serta perwakilan Indonesia di Malaysia (KBRI Kuala Lumpur dan ITPC Kuala Lumpur), Indonesia secara aktif melakukan pembelaan atas tuduhan dumping terhadap produk-produk ekspor unggulan nasional, termasuk produk dari Provinsi Riau seperti kelapa sawit, olahan perikanan, produk pertanian, dan makanan olahan.

Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan, selama tahun 2020–2024 terdapat beberapa langkah pembelaan yang berhasil dilakukan untuk menjaga akses pasar produk Indonesia di Malaysia. Meskipun Malaysia belum menjadi negara yang agresif dalam menerapkan tindakan perdagangan protektif seperti *anti-dumping* terhadap produk Indonesia, potensi tuduhan tersebut tetap diantisipasi dengan pendekatan diplomatik dan penyediaan data yang transparan. Misalnya, pada beberapa kasus yang menyangkut produk turunan kelapa sawit—yang juga merupakan komoditas utama dari Riau—Indonesia secara aktif memberikan data pembandingan dan justifikasi harga untuk membantah tuduhan *dumping* atau subsidi yang tidak berdasar.

Provinsi Riau sebagai salah satu lumbung ekspor nasional juga melakukan langkah koordinatif dengan pemerintah pusat dalam mengatasi potensi hambatan perdagangan non-tarif tersebut. Dalam hal ini, kerja sama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Riau dengan Atase Perdagangan di Malaysia serta Kementerian Perdagangan RI sangat penting dalam mengantisipasi potensi kebijakan proteksionis yang diberlakukan oleh otoritas Malaysia terhadap produk Indonesia.

Keterlibatan Riau dalam forum-forum promosi perdagangan seperti Trade Expo Indonesia (TEI) dan Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) juga memberikan ruang diplomasi informal untuk menjalin komunikasi yang konstruktif dengan mitra dagang di Malaysia, sekaligus memperkuat citra bahwa produk ekspor Riau telah memenuhi standar teknis dan perdagangan yang berlaku secara internasional.

Dengan upaya diplomasi perdagangan yang konsisten, serta dukungan kelembagaan dari pusat, produk-produk Riau dapat tetap bersaing di pasar Malaysia dan terbebas dari hambatan perdagangan seperti bea masuk anti-dumping atau pengenaan *safeguard*. Hal ini sekaligus menunjukkan sinergi antara diplomasi nasional dan diplomasi daerah dalam menjaga keberlanjutan ekspor Indonesia, khususnya dari wilayah Riau ke Malaysia.

Capaian Diplomasi Perdagangan Riau ke Malaysia

Tujuan utama dari diplomasi perdagangan Indonesia, termasuk dari wilayah Provinsi Riau, ke Malaysia adalah untuk meningkatkan volume ekspor dan mengurangi hambatan perdagangan, khususnya hambatan tarif dan non-tarif, guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Dalam periode 2020–2024, Riau menargetkan peningkatan ekspor produk unggulannya ke pasar Malaysia, seperti minyak kelapa sawit, produk perikanan, makanan olahan, dan produk industri halal.

Selama lima tahun terakhir, meskipun belum terdapat Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA) khusus antara Riau dan Malaysia, diplomasi perdagangan tetap aktif dilakukan dalam kerangka nasional dan regional, seperti ASEAN, IMT-GT, serta melalui forum bilateral dan pameran dagang. Diplomasi ini turut memfasilitasi masuknya produk Riau ke pasar Malaysia secara lebih luas.

Jika dilihat dari neraca perdagangan Indonesia-Malaysia, secara umum Indonesia mengalami surplus. Namun, apabila difokuskan pada ekspor dari Provinsi Riau, nilainya masih fluktuatif, tergantung pada dinamika permintaan Malaysia dan regulasi teknis dari otoritas setempat. Misalnya, pada awal pandemi COVID-19, beberapa produk olahan Riau mengalami penurunan ekspor akibat pembatasan logistik dan pengetatan standar impor, meski begitu, capaian diplomasi perdagangan tidak hanya dapat diukur dari volume ekspor semata, tetapi juga dari aktivitas strategis dan inisiatif yang dilakukan untuk memperkuat kerja sama dagang. Beberapa capaian penting diplomasi perdagangan Indonesia (khususnya yang relevan bagi Riau) ke Malaysia antara lain:

1. Partisipasi Aktif Riau dalam Forum Regional dan Pameran Dagang Pemerintah Provinsi Riau, bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Atase Perdagangan RI di Kuala Lumpur, aktif mengikuti ajang seperti Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) dan Selangor International Business Summit (SIBS). Dalam forum ini, berbagai produk ekspor dari Riau dipromosikan langsung kepada pelaku usaha Malaysia.
2. Penyelenggara misi dagang dan *business matching* Kegiatan misi dagang antara pelaku usaha Riau dan mitra usaha di Malaysia difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Riau, ITPC Kuala Lumpur, dan KBRI Kuala Lumpur. Melalui *business matching*, telah terjadi beberapa kontrak dagang di sektor makanan halal, produk agribisnis, serta bahan baku industri ringan.
3. Upaya peurunan Hambatan Non – Tarif dan regulasi teknis pemerintah pusat Bersama daerah secara aktif melakukan pendekatan kepada otoritas Malaysia untuk mengatasi hambatan teknis seperti standar halal, labelling produk dan sertifikasi ekspor, ini sangat penting karena produk – produk ekspor Riau sering menghadapi kendala administratif untuk bisa masuk ke pasar Malaysia secara berkelanjutan
4. Penguatan Kolaborasi Bilateral Sub- Nasional. Hubungan ekonomi sub-nasional antara Provinsi Riau dengan beberapa negara bagian Malaysia seperti Selangor dan Johor juga mulai dikembangkan. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di bidang perdagangan dan pariwisata menjadi salah satu bentuk diplomasi ekonomi antarwilayah.
5. Dukungan Infrastruktur Logistik dan Transportasi Pemerintah Provinsi Riau mendorong pengembangan pelabuhan ekspor di Dumai dan Pelabuhan Malako untuk meningkatkan efisiensi pengiriman barang ke Malaysia. Beberapa pengusaha Riau telah memanfaatkan jalur laut langsung ke Pelabuhan Port Klang, yang secara signifikan memangkas waktu dan biaya logistik.
6. Ketahanan terhadap Tuduhan Praktik Dagang Tidak Adil, Meskipun Malaysia belum secara aktif menerapkan tuduhan dumping atau safeguard terhadap produk Riau, pemerintah Indonesia tetap waspada. Melalui koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Indonesia senantiasa menyediakan data dan klarifikasi untuk membantah potensi tuduhan yang bisa merugikan pelaku usaha daerah.

Meskipun belum terbentuk perjanjian PTA khusus antara Indonesia dan Malaysia dalam periode ini, respon positif dari pemerintah Malaysia terhadap peningkatan kerja sama dagang menjadi indikasi keberhasilan diplomasi ekonomi yang sedang dibangun. Kunjungan pejabat perdagangan kedua negara, serta komunikasi rutin antara pelaku usaha, menjadi sinyal kuat bahwa diplomasi perdagangan Riau ke Malaysia memiliki prospek cerah.(Putri et al., 2024)

Secara keseluruhan, capaian diplomasi perdagangan Indonesia dan Riau ke Malaysia pada periode 2020–2024 belum sepenuhnya optimal, namun telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam membuka peluang pasar, memperkuat relasi dagang, dan mengurangi hambatan perdagangan. Hal ini menunjukkan pentingnya keberlanjutan diplomasi perdagangan berbasis daerah untuk mendukung ekspor nasional.

Peluang Perdagangan Riau di Malaysia Melalui Aliran Diplomasi Ekonomi

Pada awal periode 2020–2025, upaya diplomasi perdagangan Provinsi Riau di Malaysia masih berada dalam tahap penguatan posisi dan pengenalan produk lokal di pasar Malaysia. Meskipun Indonesia, termasuk Riau, telah menjalin hubungan perdagangan yang erat dengan Malaysia sejak lama, posisi Riau sebagai entitas ekonomi daerah masih dianggap sebagai pendatang baru dalam dinamika perdagangan bilateral secara langsung. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Riau perlu terus meningkatkan intensitas diplomasi perdagangan untuk memperluas penetrasi pasar ekspor ke Malaysia.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Riau dalam meningkatkan ekspor ke Malaysia adalah standar regulasi dan persaingan produk lokal di pasar Malaysia. Meskipun hubungan antara Indonesia dan Malaysia bersifat erat, produk ekspor dari Riau sering kali harus bersaing dengan produk sejenis dari negara lain seperti Thailand dan Vietnam. Untuk itu, pendekatan bilateral serta penguatan diplomasi ekonomi menjadi penting dalam membangun kepercayaan dan membuka peluang perdagangan baru.

Dalam kerangka diplomasi ekonomi seperti yang dikemukakan oleh Okano-Heijmans dalam konsep *five-strands of economic diplomacy*, aliran diplomasi ekonomi saling berkaitan dan dapat memperkuat efektivitas satu sama lain. Bagi Riau, pemanfaatan diplomasi komersial menjadi instrumen yang penting dalam memperkenalkan produk unggulan ke pasar Malaysia. Salah satu upaya konkret adalah penyelenggaraan promosi perdagangan melalui partisipasi dalam pameran produk di Malaysia serta kerja sama dengan Atase Perdagangan di KBRI Kuala Lumpur dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) di Johor Bahru.

Melalui kerja sama antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau dengan KJRI dan ITPC di Malaysia, telah diselenggarakan berbagai kegiatan seperti Riau Expo, misi dagang, business matching, dan temu usaha. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempertemukan pelaku usaha dari Riau dengan importir dan distributor Malaysia. Produk-produk yang dipromosikan meliputi makanan olahan, furnitur, tekstil, hasil perkebunan seperti kelapa sawit, serta kerajinan khas Melayu Riau. (Jurnal et al., 2021)

Selain promosi melalui pameran dagang, Riau juga dapat mempertimbangkan pendekatan alternatif lain seperti sistem *imbal dagang* atau *counter trade* untuk meningkatkan ekspor ke Malaysia. Dengan sistem ini, perdagangan dapat berjalan lebih seimbang, misalnya dengan mengekspor produk Riau seperti kelapa parut, briket batok kelapa, atau minyak atsiri sebagai imbal balik dari impor bahan baku industri.

Upaya lain yang dapat ditempuh adalah melalui mekanisme *investment-led diplomacy*, yakni mendorong investasi Malaysia ke Riau dan sebaliknya. Salah satu contohnya adalah mengundang investor Malaysia dalam sektor pengolahan hasil pertanian dan perkebunan untuk membuka fasilitas produksi di Riau. Investasi semacam ini tidak hanya mendongkrak nilai ekspor, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Riau bersama instansi pusat seperti Kementerian Perdagangan dan BKPM dapat memfasilitasi pendirian perusahaan patungan (*joint venture*) antara pengusaha Riau dan mitra Malaysia. Selain itu, pendekatan G2B (*government to business*) maupun B2B (*business to business*) juga dapat terus didorong dalam memperkuat jaringan dagang dan rantai pasok

regional antara Riau dan Malaysia, khususnya di kawasan Semenanjung Malaysia yang secara geografis berdekatan.

Dengan pemanfaatan berbagai saluran diplomasi ekonomi ini, Riau memiliki peluang besar untuk meningkatkan ekspor dan memperluas akses produk unggulannya di pasar Malaysia. Diplomasi perdagangan yang dilengkapi dengan strategi promosi, investasi, dan kemitraan yang adaptif menjadi kunci dalam mendukung daya saing ekspor Riau di tengah persaingan global.

KESIMPULAN

Malaysia diproyeksikan sebagai salah satu negara prospektif bagi Provinsi Riau dalam upaya peningkatan ekspor pada periode 2020–2024. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya diplomasi ekonomi sebagai instrumen utama pencapaian kepentingan nasional. Pemerintah Provinsi Riau, melalui kerja sama dengan Kementerian Perdagangan RI, Perwakilan RI di Malaysia, serta lembaga terkait lainnya, telah melakukan berbagai bentuk diplomasi perdagangan guna memperluas pasar ekspor ke Malaysia.

Upaya diplomasi perdagangan yang dilakukan oleh Provinsi Riau meliputi: partisipasi aktif dalam misi dagang ke Malaysia, penyelenggaraan forum promosi dagang seperti Riau Expo dan Business Matching, penguatan kemitraan dengan KBRI Kuala Lumpur dan ITPC Johor Bahru, serta pengusulan kerja sama bilateral dalam bentuk kemudahan ekspor produk-produk unggulan Riau ke pasar Malaysia. Selain itu, Riau juga telah menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pelaku usaha Malaysia untuk menjajaki kemungkinan pendirian industri pengolahan hasil perkebunan dan pertanian di wilayah Riau, dalam bentuk investasi langsung maupun kemitraan bisnis seperti *joint venture*. Langkah ini sejalan dengan strategi *investment-led diplomacy*, yang bertujuan untuk mendorong aliran modal masuk dan menciptakan nilai tambah bagi produk lokal. Meskipun belum seluruh target berhasil dicapai secara konkret, berbagai langkah diplomasi perdagangan yang dilakukan oleh Riau menunjukkan perkembangan yang positif. Tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan ekspor ke Malaysia antara lain adalah masih adanya hambatan tarif dan non-tarif, kurangnya informasi pasar bagi pelaku UMKM di Riau, serta ketatnya persaingan produk dari negara lain seperti Thailand dan Vietnam. Selain itu, beberapa sektor masih menghadapi keterbatasan dalam kualitas dan kapasitas produksi yang memadai untuk ekspor berkelanjutanSSS .

Namun demikian, proses diplomasi perdagangan Riau di Malaysia masih terus berjalan secara dinamis dan memiliki prospek yang menjanjikan. Malaysia, khususnya wilayah Semenanjung yang berdekatan dengan Riau secara geografis dan budaya, membuka peluang besar bagi peningkatan ekspor produk seperti kelapa, briket, makanan olahan, hasil perkebunan, serta produk kreatif lainnya. Untuk memperbesar peluang pasar ekspor Riau di Malaysia, berbagai strategi diplomasi ekonomi lainnya dapat terus dioptimalkan. Hal ini dapat dilakukan melalui intensifikasi promosi dagang, fasilitasi akses pasar, pendekatan bilateral dalam kerangka kerja sama provinsi (subnational diplomacy), serta penguatan peran aktor non-negara seperti diaspora pengusaha dan komunitas Melayu di Malaysia. Dengan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pasar, diplomasi perdagangan Provinsi Riau berpotensi menjadi ujung tombak dalam mendorong pertumbuhan ekspor daerah sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar Malaysia secara menyeluruh. penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian diplomasi ekonomi dan peran daerah dalam kebijakan luar negeri, tetapi juga memberi rekomendasi praktis bagi Pemerintah Provinsi Riau untuk menyusun strategi ekspor yang lebih efektif, serta menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi diplomasi perdagangan Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Angriawan, F., & Mutiarin, D. (2019). Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Makanan Impor oleh pedagang UMKM di Kota Pekanbaru. *Journal of Government and Civil Society*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v3i1.1036>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2020. (2021). Statistik Perdagangan Luar Negeri Provinsin Riau 2020. *Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2020*.
- Wiyototsani, M. F., Alam, G. N., & Dermawan, W. (2024). Paradiplomasi Provinsi Jawa Tengah Dalam Mempromosikan Umkm Jawa Tengah Pada Pameran Internasional (2019-2023). *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(4).
- Febrianti, S. W., & Suryadipura, D. (2022). Diplomasi Perdagangan Indonesia di Afrika Selatan (2015-2019): Upaya Peningkatan Perdagangan di Pasar Afrika Selatan. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(1), 74. <https://doi.org/10.24198/padjar.v4i1.35169>
- Jurnal, H., Tumagor, M., Ekonomi Pertahanan, S., & Pertahanan, M. (2021). *Strategi Diplomasi Perdagangan Dan Investasi Menuju Indonesia Emas 2045* (Vol. 11, Issue 2).
- Kementerian Luar Negeri RI. (2024). *Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2023*.
- Natsha Nabilla. (2021). Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Neraca Perdagangan di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Sosial Politik*, 7, 227–239.
- Putri, R. A., Swastiwi, A. W., Zazkia, N., & Alekza, Z. (2024). Diplomasi Digital Dalam Mengembangkan UMKM Go Global Go Digital di Kepulauan Riau. *Global Political Studies Journal*, 8. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v8i1>
- Rokhaniyah, H., Amalia, N. R., Susilowati, I., & Hidayat, B. H. (2022). Diplomasi Komersial Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching Dalam Mengembangkan Perdagangan UMKM Industri Pengolahan Indonesia di Malaysia Periode 2018-2019. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, 7(2), 53-72.
- Sherlya Paiti, A. (2009). *Jom FISIP 1 Upaya Indonesia Mengekspor Sagu Ke Malaysia (Studi Kasus: Kabupaten Kepulauan Meranti)*. <http://sagumeranti2010.blogspot.co.id/>